# LKjIP

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021

**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN**
**Jalan Gajah Mada No. 1 Pacitan, Jawa Timur 63511**
**e-mail: dinkopdanum@pacitankab.go.id**
**web: dinaskoperasi.pacitankab.go.id**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2021 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021. LKjIP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah.

Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan.

Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pacitan, Desember 2021

Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Pacitan

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

Dra. ENY SETYOWATI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196404011990032008

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR ..... 2

DAFTAR ISI ..... 3

RINGKASAN EKSEKUTIF ..... 4

BAB I. PENDAHULUAN ..... 6

1.1 Struktur Organisasi ..... 7

1.2 Maksud dan Tujuan ..... 7

1.3 Isu Strategis ..... 8

1.4 Keadaan Pegawai ..... 9

1.5 Keadaan Sarana Prasarana ..... 11

1.6 Keuangan ..... 11

1.7 Sitematika ..... 13

BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..... 16

2.1 Perencanaan Strategis ..... 16

2.2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021 ..... 21

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA ..... 26

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2020 ..... 26

3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 .... 29

3.3 Realisasi Anggaran ..... 59

3.4 Inovasi ..... 60

BAB IV. PENUTUP ..... 62

LAMPIRAN ..... 63

## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2021 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis. Ringkasan prestasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan yang dihasilkan di tahun 2021 dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: menurunnya pengangguran, dengan indikatornya tingkat pengangguran terbuka. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2021 adalah 2.12% .
b. Sasaran 2: Meningkatnya kemandirian usaha mikro dan koperasi, dengan indikatornya Persentase koperasi yang mandiri dan persentase jumlah wirusaha baru. Capaian kinerja sampai dengan akhir Bulan Desember 2020 adalah 1.15 % dan 5 %.

Evaluasi atas pencapaian kinerja dan permasalahan yang ditemui pada setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan ke depan, sebagai berikut:

1. Adanya Kesenjangan kebutuhan pasar dengan ketersediaan tenaga kerja yang dibutuhkan.
2. Pengelolaan Koperasi belum dilaksanakan secara profesional dan akuntabel.
3. Kurang siapnya UMKM dalam menghadapi pemasaran secara online

4. Keterbatasan SDM di bidang tenaga kerja baik di dalam atau di lapangan seperti memantau petugas rekruitmen tenaga kerja yang ditugasi oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja khususnya di sektor AKAD karena selama ini banyak sekali petugas rekruitmen yang ilegal dan pemberangkatnanya tidak menggunakan prosedur yang tepat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

# BAB I

# Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia. Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2021 diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan.
2. Mendorong Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## 1.1. STRUKTUR ORGANISASI

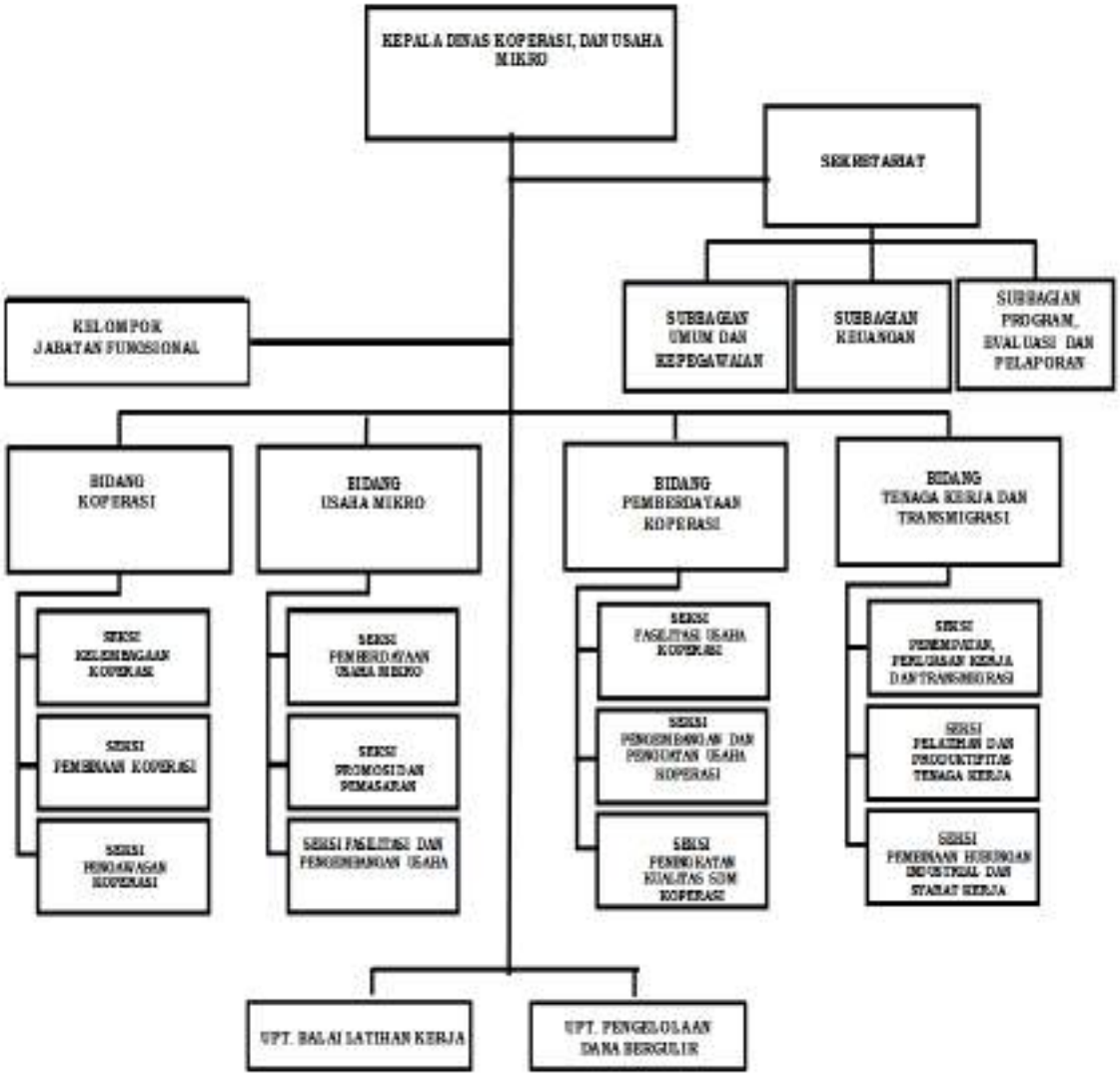


## 1.2. FUNGSI DAN TUGAS

Peraturan Bupati Pacitan Nomor 63 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 27 Tahun 2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang Pembentukan UPT dan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 55 Tahun 2018 tanggal 20 Juli 2018 tentang keududkan, tugas dan fungsi, susuanan organisasi, serta tata kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan menetapkan bahwa Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang koperasi, usaha mikro, tenaga kerja dan transmigrasi.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi koperasi;
b. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi usaha mikro;
c. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi pemberdayaan koperasi;
d. Perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan administrasi tenaga kerja dan transmigrasi;
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 1.3. ISU STRATEGIS

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemukenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan, antara lain sebagai berikut:

1. Masih rendahnya koperasi yang aktif dan sehat disebabkan oleh faktor manajemen koperasi yang belum profesional
2. Ketersediaan data yang akurat juga menjadi salah satu permasalahan utama dalam pengembangan Usaha Mikro. Hal tersebut menyebabkan efektivitas pembinaan Usaha Mikro belum optimal. Oleh karena itu, strategi pengembangan Usaha Mikro harus dimulai dengan penyediaan data dukung yang akurat.
3. Rendahnya motivasi angkatan kerja untuk berwirausaha, karena keterbatasan modal usaha, dan kurangnya akses pasar.

## 1.4. KEADAAN PEGAWAI

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi Usaha MIkro Kabupaten Pacitan didukung oleh pegawai sejumlah 66 orang terdiri :

a. Berdasarkan Status Pegawai :

| NO | PEGAWAI | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 29 | 43.94 |
| 2 | NON PNS | 37 | 56.06 |
| | TOTAL | 66 | 100 |

Grafik Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Mikro Kab.Pacitan

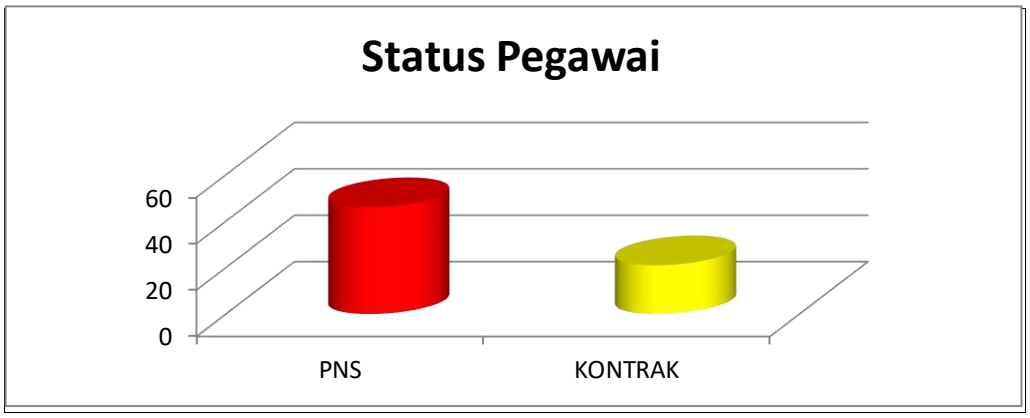


b. Berdasarkan Jenis Kelamin :

| NO | PEGAWAI | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | LAKI - LAKI | 40 | 60.60 |
| 2 | PEREMPUAN | 26 | 39.40 |
| | TOTAL | 66 | 100 |

Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

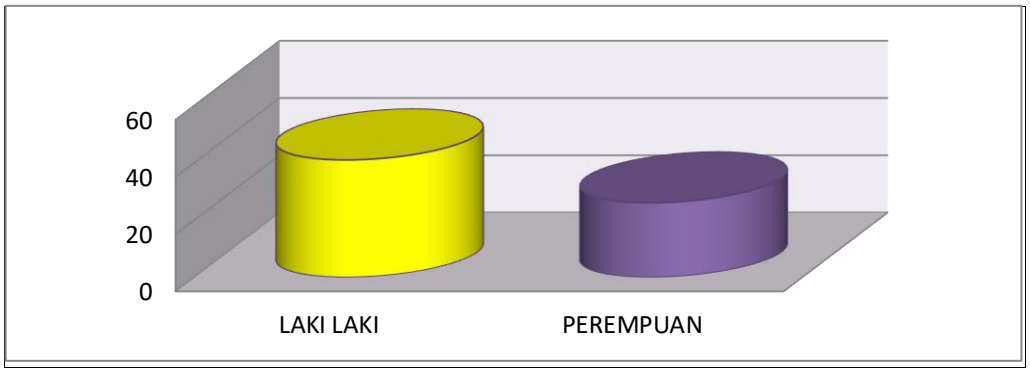

c. Berdasarkan Pendidikan

| NO | PENDIDIKAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | PASCA SARJANA | 6 | 9 |
| 2 | SARJANA | 47 | 72 |
| 3 | DIPLOMA | 1 | 1 |
| 4 | SLTA | 12 | 18 |
| 5 | SLTP | - | - |
| 6 | SD | - | - |
| | TOTAL | 66 | 100 |

Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Pendidikan

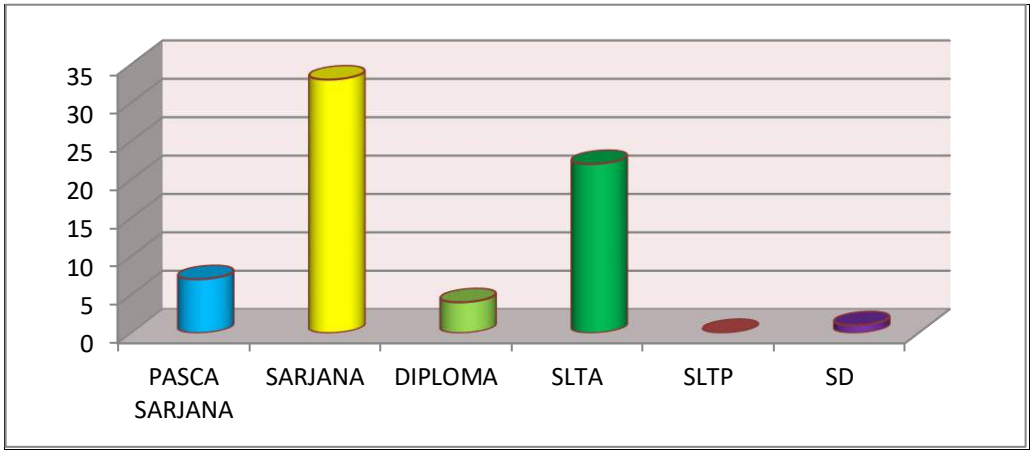


d. Berdasarkan Golongan Kepangkatan

| NO | GOLONGAN KPANGKATAN | JUMLAH | % |
|---|---|---|---|
| 1 | GOLONGAN IV | 4 | 13.80 |
| 2 | GOLONGAN III | 20 | 68.97 |
| 3 | GOLONGAN II | 4 | 13.79 |
| 4 | GOLONGAN I | 1 | 3.44 |
| | TOTAL | 29 | 100 |

Grafik Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

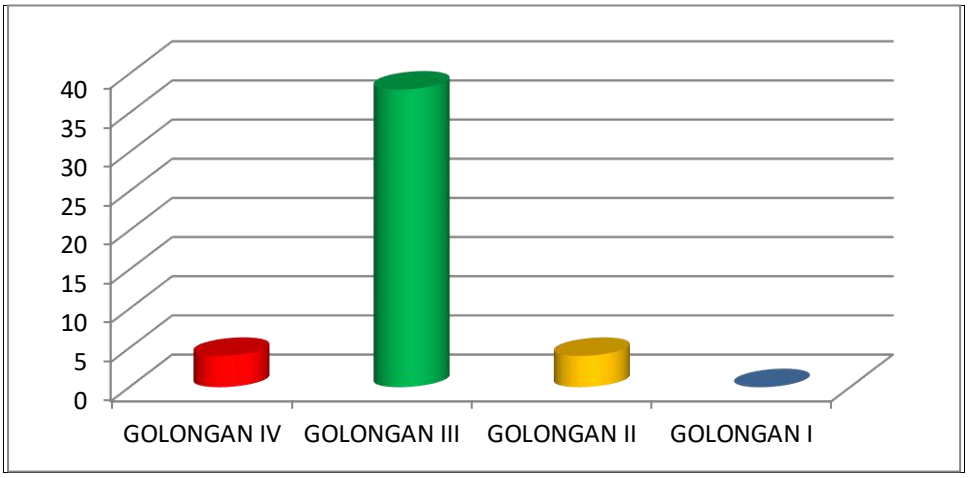


## 1.5. KEADAAN SARANA DAN PRASARANA

| NO | JENIS BARANG | JUMLAH |
|---|---|---|
| 1 | MOBIL | 2 Unit |
| 2 | SEPEDA MOTOR | 11 Unit |
| 3 | LAPTOP / KOMPUTER | 48 Unit |
| 4 | PRINTER | 22 Unit |
| 5 | PROYEKTOR | 8 Unit |
| 6 | FAX | 2 Unit |
| 7 | TELP | 2 Unit |
| 8 | KAMERA | 3 Unit |

## 1.6. KEUANGAN

Tabel

Program, Kegiatan dan Anggaran

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan TA 2021

| No | | Uraian | Anggaran |
|---|---|---|---|
| **BELANJA DAERAH** | | | **8.188.084.553,00** |
| **BELANJA OPERASI** | | | **8.153.197.553,00** |
| **BELANJA MODAL** | | | **34.887.000,00** |
| **I** | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah** | **1.000.000.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | **Daerah Kabupaten/Kota** | |
| | 1 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.000.000.000,00 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1.000.000.000,00 |
| **II** | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **3.286.889.017,00** |
| | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.767.050.,00 |
| | | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 2.761.850,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.499.850,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.499.850,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.499.850,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3.499.850,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.243.950,00 |
| | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2.761.850,00 |
| | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.889.417.717,00 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.879.811.717,00 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1.148000,00 |
| | | Kordinasi dan pelaksanaan Akuntansi SKPD | 6.860.000,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 450.000,00 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 1.148.000,00 |
| | 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 38.520.620,00 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penenrangan Bangunan Kantor | 2.770.500,00 |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.760.750,00 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan | 20.989.370,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Konsultasi SKPD | |
| | 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34.887.000,00 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34.887.000,00 |
| | 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 290.376.430,00 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 29.722.450,00 |
| | | Peneydiaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 79.431.080,00 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.422.900,00 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 160.800.000,00 |
| | 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah | 10.920.200,00 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.600.000,00 |
| | | Pememliharaan Perlaatan dan Mesin Lainnya | 6.320.200,00 |
| **III** | | **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam** | **14.000.000,00** |
| | 1 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 14.000.000,00 |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 14.000.000,00 |
| **IV** | | **Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **2.544.243.936,00** |
| | 1 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 2.544.243.936,00 |
| | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 2.544.243.936,00 |
| **V** | | **Program Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi** | **15.000.000,00** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 |
| | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Katangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. | 15.000.000,00 |
| **VI** | | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | **14.657.800,00** |
| | 1 | Penataan Persebaran Panduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.657.800,00 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.657.800,00 |
| **VII** | | **Program Hubungan Industrial** | **14.245.800,00** |
| | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.245.800,00 |
| | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Saran Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan | 14.245.800,00 |
| **VIII** | | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** | **528.058.000,00** |
| | 1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 230.375.000,00 |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 230.375.000,00 |
| | 2 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 297.683.000,00 |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Penetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | 297.683.000,00 |
| **IX** | | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** | **155.000.000,00** |
| | 1 | Pemebrdayaan dan Perlindungan Koperasi | 155.000.000,00 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tamabah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajement, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 155.000.000,00 |
| **X** | | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** | **615.990.000,00** |
| | 1 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kmeitraan, Kemudahan, Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 615.990.000,00 |
| | | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | 17.790.000,000 |
| | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 598.200.000,00 |

## 1.7. SISTEMATIKA LKjIP

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Ringkasan Eksekutif memuat:

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendalakendala yang dihadapi dalam pencapaiannya;
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menanggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kabupaten Pacitan, Potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan Sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

Disajikan pula Inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

# BAB II
# Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

## 2.1 Perencanaan Strategis

Memasuki Tahun 2020, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan merupakan manifestasi komitment Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Pacitan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021.

Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2011-2016). RPJMD Pemerintah Kabupaten Pacitan merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan No. 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2016-2021 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penetapan Perubahan Kedua Recana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan 2016-2021

### 2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi misi dijabarkan dalam Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yang selengkapnya dituangkan dalam bagan alir cascade RPJMD Kabupaten Pacitan 2016-2021 sebagaimana disajikan pada tabel berikut

| Visi : Maju dan Sejahtera Bersama Rakyat | | | |
|---|---|---|---|
| Misi I : Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, efektif dan Akuntabel | | | |
| **Tujuan** | **Sasaran** | **Strategi** | **Arah Kebijakan** |
| 1. Terwujudnya pemerintahan yang profesional dan menerapkan good governance | 1. Meningkatnya pelayanan publik yang prima<br>2. Meningkatnya transparansi, akuntabilitas kinerja dan pengelolaan keuangan daerah | 1. Meningkatkan pelayanan publik secara professional<br>2. Menerapkan reformasi birokrasi dan peningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan | 1.1 Peningkatan pelayanan publik berbasis IT<br>1.2 Peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah |
| Misi II : Meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sosial masyarakat | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
| 1. Percepatan penanggulangan kemiskinan | 1.1. Menurunnya penganggur an | 1.1 Memperluas kesempatan kerja dan usaha | 1.1. Peningkatan kapasitas dan ketrampilan angkatan kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar |
| Misi III : Membangun perekonomian masyarakat dengan mengerahkan potensi daerah didukung ketersediaan infrastruktur yang memadai | | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi | ArahKebijakan |
| 1. Meningkatkan daya saing ekonomi daerah | 1.1. Meningkatnya kemandirian usaha mikro dan koperasi | 1.1 Meningkatkan peran usaha mikro dan koperasi dalam aktifitas ekonomi untuk mendukung sektor unggulan daerah | 1.1 Penguatan dan pemberdayaan usaha mikro dan koperasi<br>1.2 Pengembangan sistem kemitraan usaha mikro dan koperasi dengan sektor unggulan daerah |

### 2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perngkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka Tujuan dan sasaran Jangka menengah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan selama 5 tahun anggaran adalah :

| PERANGKAT DAERAH | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **No** | **TUJUAN** | **INDIKATOR** | **SASARAN** | **INDIKATOR** | |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** | |
| 1 | Terselenggarakannya tata kelola pemerintahan yang baik di bidang koperasi dan usaha mikro. | kepuasan masyarakat terhadap pelayanan OPD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro | Meningkatnya akuntabilitas Perangkat Daerah | 1.1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat PD |
| | | | Meningkatnya kualitas pelayanan Perangkat Daerah | 1.2 | Nilai evaluasi SAKIP PD |
| 2 | Meningkatnya kualitas angkatan kerja | Persentase penurunan penganggur an | Menurunnya pengangguran | 2.1 | Tingkat pengangguran terbuka |
| 3 | Meningkatkan daya saing ekonomi daerah melalui koperasi dan usaha mikro | Persentase pertumbuhan koperasi yang mandiri | Meningkatnya kemandirian usaha mikro dan koperasi | 3.1 | Persentase koperasi yang mandiri |
| | | Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru | | 3.2 | Persentase jumlah wirausaha baru |

### 2.1.3 Program dan Kegiatan Perngkat Daerah

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.

| PERANGKAT DAERAH | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SASARAN** | **INDIKATOR** | | **PROGRAM** | **INDIKATOR** | **KEGIATAN** | **INDIKATOR** | **SUB KEGIATAN** | **INDIKATOR** |
| **1** | **2** | | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Meningkatnya pelayanan Perangakat Daerah | 1.1 | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Hasil nilai evaluasi sakip perangkat daerah | Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah | Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja dinas | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah |
| | | | | | | | Koordinasi dan penyusunan dokumen rka-skpd | Jumlah dokumen rka-skp |
| | | | | | | | Koordinasi dan penyusunan dokumen perubahan rka-skpd | jumlah dokumen perubahan rka skpd |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah dokumen DPA SKPD |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD |
| | | | | | | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah dokumen laporan capaian kinerja PD |
| | | | | | | | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah dokumen evaluasi kinerja |
| Meningkatnya Akuntabilitas Dinas Koperasi, Usaha Mikro | | Nilai hasil survey Indeks Kepuasan Masyr | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Terlaksananya kegiatan administrasi keuangan perangkat | Penyediaan gaji dan tunjangan asn | (1) tersedianya gaji dan tunjangan asn<br><br>(2) tersedianya tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja asn |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | akat | | | | daerah | Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd | Jumlah dokumen pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan skpd |
| | | | | | | | Koordinasi dan pelaksanaan akuntansi skpd | Jumlah dokumen pelaksanaan akuntansi skpd |
| | | | | | | | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun skpd | Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun |
| | | | | | | | Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran skpd | Jumlah dokumen laporan keuangan |
| | | | | | Administrasi umum perangkat daerah | Terpenuhinya administrasi umum dinas | Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor | Terpenuhinya penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor |
| | | | | | | | Penyediaan barang cetakan dan penggandaan | Terpenuhinya penyediaan barang cetakan dan penggandaan |
| | | | | | | | Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi skpd | Terpenuhinya penyediaan makanan dan minuman dan terlaksanannya rapat rapat koordinasi dan konsultasi skpd |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Pengadaan BMD penunjang urusan pemerintah daerah | Terpenuhinya pengadaan bmd | Pengadaan peralatan dan mesin lainnya | Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| | | | | | Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Terpenuhinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah | Penyediaan jasa surat menyurat | Terpenuhinya jasa surat menyurat |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Terpenuhinya jasa kominikasi,sumber daya air dan listrik |
| | | | | | | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Terpenuhinya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |
| | | | | | | | Penyediaan jasa pelayanan umum kantor | Terpenuhinya jasa pelayanan umum kantor |
| | | | | | Pemeliharaan barangmilik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah | Terpenuhinya pemeliharaan BMD | Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan | Terpenuhinya jasa jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan |
| | | | | | | | Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya | Terpenuhinya pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Meningkatnya daya saing ekonomi daerah melalui koperasi dan usaha mikro | 2.1 | Persentase koperasi mandiri | Program pelayanan izin usaha simpan pinjam | Persentase koperasi mandiri | Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksanaanya penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Fasilitasipemenuhanizinusaha simpan pinjam danpembukaan kantorcabang,cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang memiliki izin usaha simpan pinjam |
| | 3.1 | | Program pengawasan dan pemeriksaan koperasi | Persentase koperasi mandiri | Pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaannya dalam | Terlaksanaanya pemeriksaan dan pengawasan koperasi, koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang | Pengawasan kekuatan, kesehatan, kemandirian, ketangguhan, serta akuntabilitas koperasi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | daerah kabupaten/ kota | wilayah keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota | | |
| | 4.1 | | Program pendidikan dan latihan perkoperasian | Persentase koperasi mandiri | Pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan perkoperasian serta kapasitas dan kompetensi sdm koperasi | Jumlah anggota koperasi yang mengikuti pelatihan |
| | | | | Persentase usaha mikro yang dibina | Pendidikan dan latihan ukm bagi ukm dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pendidikan dan latihan bagi um yang wilayah | Peningkatan pemahaman dan pengetahuan ukm serta kapasitas dan kompetensi sdm ukm | Jumlah peningkatan wirausaha baru ; jumlah usaha mikro yang mengalami peningkatan kualitas sdm |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | keanggotaan dalam daerah kabupaten/ kota | | |
| | 5.1 | | Program pemberdayaan dan perlindungan koperasi | Persentase koperasi mandiri<br>Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru | Pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota | Terlaksanannya pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/ kota | Pemberdayaan peningkatan produktivitas, nilai tambah, akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan, penataan manajemen, standarisasi, dan restrukturisasi usaha koperasi kewenangan kabupaten/kota | Jumlah kumkm yang mendapatkan fasilitasi permodalan |
| | 6.1 | | Program pemberdayaan usaha | Persentase peningkatan jumlah wirausaha | Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan | Terlaksanannya pemberdayaan usaha | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | Jumlah UKM terdata yang diberdayakan melalui kemitraan usaha mikro |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) | baru | melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | Jml usaha mikro yang mendapatkan pendampingan usaha |
| | | | | | | | | |
| Menurunnya Pengangguran | 7.1 | Tingkat Pengangguran terbuka | Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota | Persentase pembinaan tenaga kerja | Administrasi kepegawaian perangkat daerah | Persentase pembinaan tenaga kerja | Sosialisasi peraturan perundang-undangan | Jumlah peserta sosialisasi perundang-undangan cukai dan ketenagakerjaan |
| | | | Program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga | Persentase pembinaan tenaga kerja | Pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi | (1) terlaksananya pelatihan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja | Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi | Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | kerja | | | (2) terpenuhinya sarana pelatihan kerja | | |
| | | | Program hubungan industrial | Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja | Pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota | Terlaksananya pengesahan peraturan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan | Penyelenggaraan pendataan dan informasi sarana hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja serta pengupahan | Jumlah peserta sosialisasi hubungan industrial |

## 2.2 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2021

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran.

Tiga urusan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan terdiri dari dua urusan wajib, yaitu urusan tenaga kerja dan urusan koperasi UKM dan satu urusana pilihan, yaitu urusan transmigrasi.

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun 2021 disajikan pada tabel berikut.

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | | Target |
|---|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | | *4* |
| 1 | Meningkatnya koperasi mandiri dan usaha mikro yang baru | 1 | Jumlah UM non BPR/LKM UM | 23,005 |
| | | 2 | Persentase usaha mikro yang dibina | 3,52 % |
| | | 3 | Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru | 3,97 % |
| | | 4 | Persentase peningkatan usaha mikro yang mendapat bantuan modal | 1,48 % |
| | | 5 | Jenis dan Jumlah bank dan cabang | 14 unit<br>6 unit |
| | | 6 | Jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang | 2,42 % |
| | | 7 | Persentase koperasi mandiri | 5,542 unit |
| | | 8 | Jumlah BPR/LKM | |
| 2 | Menurunnya pengangguran | 9 | Persentase tingkat partisipasi angkatan kerja | 81% |
| | | 10 | Persentase penyelesaian perselisihan pekerjaan dan pengusaha | 100 % |
| | | 11 | Tingkat pengangguran | 1% |
| | | 12 | Keselamatan dan perlindungan | 16 |
| | | 13 | Perselisihan buruh dan pengusaha | 100 % |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | terhadap kebijakan pemerintah daerah | 64,8 % |
| | | 14 | Persentase penempatan tenaga kerja melalui AKL AKAD dan AKAN | 100 %<br>100 % |
| | | 15 | Persentase pembinaan tenaga kerja | 100 % |
| | | 16 | Persentase Transmigrasi swakarsa | 607 |
| | | 17 | Persentase transmigran yang ditetapkan | 0,49 %<br>99,00% |
| | | 18 | Rasio kelulusan S1/S2/S3 | |
| | | 19 | Rasio ketergantungan | |
| | | 20 | Persentase penduduk yang bekerja | |
| 3 | Meningkatnya akuntabilitas PD | 21 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat PD | Baik |
| 4 | Meningkatnya kualitas pelayanan PD | 22 | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | BB |

## 2.2. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan melaksanakan kegiatan dengan anggaran induk sebesar Rp 6.341.365.837,-. dengan rincian Belanja Operasi Rp 6.141.158.837,- dan Modal Rp 200.207.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp 8.188.084.553,-. dengan rincian Belanja Operasi Rp 8.153.197.553,- dan Belanja Modal Rp 34.887.000,-.

### 2.2.1 Target Belanja

| Uraian | Target | Persentase |
|---|---|---|
| **Belanja Operasi** | 8.153.197.553,- | 99,58 |
| **Belanja Modal** | 34.887.000,- | 0,42 |
| **Jumlah** | 8.188.084.553,- | 100 |

### 2.2.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran

Anggaran belanja langsung Tahun 2021 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

| No | Sasaran | Anggaran | Persentase | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meningkatnya koperasi mandiri dan usaha mikro yang baru | 4.614.937.017 | 56,37 | 6 Program<br>12 Kegiatan<br>29 Sub Kegiatan |
| 2 | Menurunnya pengangguran | 3.573.147.536 | 43,63 | 4 Program<br>4 Kegiatan<br>4 Sub Kegiatan |

**PERJANJIAN KINERJA :**

**PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN**
**DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO**
Jalan Gadjah Mada Nomor 1 Pacitan 63511 **P A C I T A N**
Website : dinaskoperasi.pacitankab.go.id
Email : dinkopdanum@pacitankab.go.id

## PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama : Dra. ENY SETYOWATI, MM.**
**Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN**

Selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama : INDRATA NUR BAYUAJI**
**Jabatan : BUPATI PACITAN**

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memberikan penghargaan dan sanksi.

Pacitan, 28 Oktober 2021

| Pihak Kedua, | Pihak Pertama, |
|---|---|
| **BUPATI PACITAN** | **KEPALA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KABUPATEN PACITAN** |
| **INDRATA NUR BAYUAJI** | **Dra. ENY SETYOWATI, MM.** |
| | Pembina Utama Muda |
| | NIP. 19640401 199003 2 008 |

# BAB III
# Akuntabilitas Kinerja

## 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2021

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan tahun 2021 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja (penentuan posisi) sesuai dengan tingkat capaian kinerja yaitu:

| No | Capaian Kinerja | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Nilai 91 ≤ 100 | Sangat Baik |
| 2 | Nilai 76 ≤ 90 | Baik |
| 3 | Nilai 66 ≤ 75 | Sedang |
| 4 | Nilai 51 ≤ 65 | Kurang |
| 5 | Nilai ≤ 50 | Sangat Kurang |

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk persentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah.

Persentase capaian kinerja dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik. Penghitungan persentase capaian kinerja perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target - (Realisasi - Target)}}{\text{Target}} \times 100\ \%$$

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan menggunakan kedua rumus diatas. Rumus kedua digunakan untuk mengukur kinerja sasaran menurunnya pengangguran dengan indikator kinerja tingkat pengangguran terbuka dan rasio ketergantungan karena semakin meningkat jumlah kedua indikator tersebut, semakin rendah capaian kinerja sasaran ini.

Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Target 2021 | Realisasi 2021 | Capaian | Kriteria |
|---|---|---|---|---|---|
| **ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT** | | | | | |
| **Fokus Kesejahteraan Sosial** | | | | | |
| 1 | **Ketenagakerjaan** | | | | |
| 1.1 | Persentase Penduduk Yang Bekerja | 99 | 97.88 | 98.87 | Sangat Baik |
| **ASPEK PELAYANAN UMUM** | | | | | |
| **Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar** | | | | | |
| 2 | **Tenaga Kerja** | | | | |
| 2.1 | Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja | 81 | 80.59 | 99.49 | Sangat Baik |
| 2.2 | Persentase Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3 | Tingkat Pengangguran Terbuka | 1 | 2.12 | 12 | Sangat Kurang |
| 2.4 | Keselamatan dan Perlindungan | 16 | 37 | 231,25 | Sangat Baik |
| 2.5 | Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik |
| 2.6 | Persentase Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKL, AKAD dan AKAN | 64,8 | 59.84 | 92.35 | Sangat Baik |
| 2.7 | Persentase Pembinaan Tenaga Kerja | 100 | 100 | 100 | Sangat Baik |
| 3 | **Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | | |
| 3.1 | Jumlah UM Non BPR / LKM UM | 23.005 | 25.000 | 108.67 | Sangat Baik |
| 3.2 | Jumlah BPR / LKM | 5.542 | 5.542 | 100 | Sangat Baik |
| 3.3 | Persentase Usaha Mikro Yang Dibina | 3,52 | 3.76 | 106.8 | Sangat Baik |
| 3.4 | Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru | 3,97 | 5 | 125.94 | Sangat Baik |
| 3.5 | Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Mendapat Bantuan Modal | 1,48 | 0.46 | 31.08 | Sangat Kurang |
| 3.6 | Persentase Koperasi Mandiri | 2,42 | 1.16 | 47.93 | Sangat Kurang |
| **Fokus Pelayanan Urusan Pilihan** | | | | | |
| 4 | **Ketransmigrasian** | | | | |
| 4.1 | Persentase Transmigrasi Swakarsa | 66,67 | 66,67 | 100 | Sangat Baik |
| 4.2 | Persentase transmigran yang ditetapkan | 100 | 0 | 0 | Sangat Kurang |
| **ASPEK DAYA SAING DAERAH** | | | | | |
| **Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur** | | | | | |
| 5 | Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | |
| 5.1 | Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang | 14 | 10 | 71.42 | Sedang |
| 5.2 | Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang | 14 | 7 | 50 | Sangat Kurang |
| **Fokus Sumber Daya Manusia** | | | | | |
| 6 | **Ketenagakerjaan** | | | | |
| 6.1 | Rasio Lulusan S1/S2/S3 | 607 | 291 | 47.94 | Sangat kurang |
| 6.1 | Rasio Ketergantungan | 0.49 | 0.44 | 89,79 | Baik |
| 7 | | | | | |
| 7.1 | Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat PD | Baik | Baik | Baik | Baik |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Nilai evaluasi SAKIP Perangkat Daerah | B | B | B | Baik |

## 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021

Dalam sub bab ini akan disajikan pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan yang dicerminkan dalam capaian Indikator Kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut aspek diuraikan sebagai berikut:

### 3.2.1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat (Fokus Kesejahteraan Sosial)

#### 3.2.1.1. Urusan Ketenagakerjaan

##### 3.2.1.1.1. Persentase Penduduk yang Bekerja

Indikator Kinerja persentase penduduk yang bekerja pada tahun 2021 sebesar 97.88 % atau mencapai 98.87 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021 . Dicapai melalui persentase jumlah penduduk yang bekerja dibagi jumlah angkatan kerja. Dimana jumlah penduduk yang bekerja 362.717 dan jumlah angkatan kerja 370.577. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ,dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (DBHCHT).
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT).

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 97.72 % naik 0.16 % menjadi 97.88 %.

### 3.2.2. Aspek Pelayanan Umum

### (Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar)

### 3.2.2.1. Urusan Tenaga Kerja

#### 3.2.2.1.1. Persentase Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator Kinerja persentase tingkat partisipasi angkatan kerja pada tahun 2021 sebesar 80.59 % atau mencapai 99.49 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021 . Dicapai melalui persentase jumlah angkatan kerja dibagi jumlah usia kerja. Dimana jumlah angkatan kerja 370.577 dibagi jumlah usia kerja 459.853. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan:

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ,dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (DBHCHT).
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT).

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 80.36 naik 0.23 % menjadi 80.59 %.

#### 3.2.2.1.2. Persentase Penyelesaian Perselisihan Pekerja dan Pengusaha

Indikator Kinerja persentase penyelesaian perselisihan pekerja dan pengusaha pada tahun 2021 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 . Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

serta Pengupahan , dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.
Capaian kinerja tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu 100 %.

### 3.2.2.1.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator Kinerja tingkat pengangguran terbuka pada tahun 2021 sebesar 2.12 % atau mencapai 12 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021 . Dicapai melalui persentase jumlah pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja. Dimana jumlah pengangguran 7860 dan jumlah angkatan kerja 370.577. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ,dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (DBHCHT).
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT).

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dari 2.28 % naik 0.16 % menjadi 2.12 %. Perekonomian yang membaik tecermin dari semakin menurunnya tingkat pengangguran terbuka. Semakin meningkat pengangguran maka akan semakin tidak produktif penduduknya, sehingga penduduk tidak akan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, kebutuhan hidup yang semakin tidak terpenuhi akan meningkatkan tingkat kemiskian

### 3.2.2.1.4. Keselamatan dan Perlindungan

Indikator Kinerja keselamatan dan perlindungan pada tahun 2021 sebesar 37 atau mencapai 231,25 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 .

Dicapai melalui jumlah perusahaan yang menerapkan sistem keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dimana terdapat 37 perusahaan dari 79 total perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak .

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan , dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.

Capaian kinerja tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu 37.

### 3.2.2.1.5. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Indikator Kinerja Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah pada tahun 2021 sebesar 100% atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Hubungan Industrial, Kegiatan Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan , dengan output yang dihasilkan adalah Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan.

Capaian kinerja tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu 100%.

### 3.2.2.1.6. Persentase Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKL, AKAD dan AKAN

Indikator Kinerja Persentase Penempatan Tenaga Kerja Melalui AKL, AKAD dan AKAN pada tahun 2021 sebesar 59.84 % atau mencapai 92.35 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021 . Dicapai melalui persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dibagi jumlah pendaftar. Dimana jumlah pencari kerja yang ditempatkan 800 dan jumlah pendaftar 1337. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ,dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (DBHCHT).
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT).

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 yaitu dari 65.67 % turun 5.83% menjadi 59.84 %.

### 3.2.2.1.7. Persentase Pembinaan Tenaga Kerja

Indikator Kinerja Persentase pembinaan Tenaga Kerja pada tahun 2021 sebesar 100 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2020 . Dicapai melalui persentase jumlah peserta pelatihan pembinaan tenaga kerja dibagi jumlah target peserta pelatihan pembinaan tenaga kerja. Dimana jumlah dan target

peserta pelatihan pembinaan tenaga kerja 592 orang. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan :

1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan ,dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan (DBHCHT).
2. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja, Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi, Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi dengan output yang dihasilkan Jumlah peserta pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja (DBHCHT).

Capaian kinerja tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu 100 %.

### 3.2.2. Aspek Pelayanan Umum
### (Fokus Pelayanan Urusan Wajib Non Dasar)
### 3.2.2.2. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
#### 3.2.2.2.1. Jumlah UM Non BPR / LKM UM

Indikator Kinerja jumlah UM non BPR/LKM UM pada tahun 2021 sebesar 25.000 atau mencapai 108,67 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, sub kegiatan sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan output Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro.

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 23.170 naik 1830 menjadi 25000 .

### 3.2.2.2.2. Jumlah BPR / LKM

Indikator Kinerja jumlah BPR/LKM pada tahun 2021 sebesar 5.542 atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, sub kegiatan Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro dengan output Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro.

Capaian kinerja tahun 2021 sama dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 5.542 .

### 3.2.2.2.3. Persentase Usaha Mikro Yang Dibina

Indikator Kinerja Persentase usaha mikro yang dibina pada tahun 2021 sebesar 3,76 % atau mencapai 106.8 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 . Dicapai melalui persentase jumlah UM yang dibina tahun bersangkutan dibagi jumlah seluruh UMKM. Dimana jumlah UM yang dibina tahun bersangkutan 940 dan jumlah seluruh UMKM 25.000.

Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan ouput Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pendampingan usaha; Jumlah bantuan alat pengering biofarmaka; Jumlah dokumen FS DED Revitalisasi PLUT.

Capaian kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2019 yaitu dari 3,50 % naik 0,03 menjadi 3.53 %.

### 3.2.2.2.4. Persentase Peningkatan Jumlah Wirausaha Baru

Indikator Kinerja Persentase peningkatan jumlah wirausaha baru pada tahun 2021 sebesar 5 % atau mencapai 125.94 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021 . Dicapai melalui persentase jumlah wirausaha baru tahun bersangkutan dibagi jumlah seluruh UMKM. Dimana jumlah UM yang dibina tahun bersangkutan 1250 dan jumlah seluruh UMKM 25000. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan : Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM), Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, sub kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro dengan ouput Jumlah usaha mikro yang mendapatkan pendampingan usaha; Jumlah bantuan alat pengering biofarmaka; Jumlah dokumen FS DED Revitalisasi PLUT.

Capaian kinerja tahun 2020 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 3,82 % naik 1.18 menjadi 3.82 %.

### 3.2.2.2.5. Persentase Peningkatan Usaha Mikro Yang Mendapat Bantuan Modal

Indikator Kinerja Persentase peningkatan usaha mikro yang mendapat bantuan modal pada tahun 2021 sebesar 0,46 % atau mencapai 31.08 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021. Dicapai melalui persentase jumlah KUMKM yang mendapat fasilitasi permodalan dibagi jumlah seluruh UMKM. Dimana jumlah KUMKM yang mendapat fasilitasi permodalan 115 dan jumlah seluruh UMKM 25000. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI, Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi

Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output yang dihasilkan Jumlah KUMKM yang mendapat fasilitasi permodalan.

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 0.51 % turun 0.05 menjadi 0.46 % karena adanya pandemic covid-19.

#### 3.2.2.2.6. Persentase Koperasi Mandiri

Indikator Kinerja Persentase koperasi mandiri pada tahun 2021 sebesar 1.16% atau mencapai 47.93 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021. Dicapai melalui persentase jumlah koperasi yg dinilai tahun bersangkutan dibagi jumlah seluruh koperasi. Dimana penilaian koperasi taun terakhir ada 6 koperasi dan jumlah seluruh koperasi 518. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi, Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota dengan output adalah Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu 1.16 % .

### 3.2.2. Aspek Pelayanan Umum
### (Fokus Pelayanan Urusan Pilihan)
### 3.2.2.3. Urusan Ketransmigrasian
#### 3.2.2.3.1. Persentase Transmigrasi Swakarsa

Indikator Kinerja Persentase transmigrasi swakarsa pada tahun 2021 sebesar 66,67 % atau mencapai 100 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut sudah mencapai target RPJMD tahun 2021. Dicapai melalui persentase Jumlah transmigrasi swakarsa tahun terakhir dibagi jumlah

seluruh transmigrasi swakarsa. Dimana Jumlah transmigrasi swakarsa tahun terakhir 10 dan jumlah seluruh transmigrasi swakarsa 150. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotadengan output yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 66,67 %.

### 3.2.2.3.2. Persentase Transmigrasi yang Ditempatkan

Indikator Kinerja Persentase transmigrasi yang ditempatkan pada tahun 2021 sebesar 0 % atau mencapai 0 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021. Dicapai melalui persentase Jumlah transmigrasi yang ditempatkan tahun bersangkutan dibagi Jumlah transmigrasi tahun bersangkutan. Dimana Jumlah transmigrasi yang ditempatkan tidak ada karena pembatalan pemberangkatan sehubungan dengan adanya pandemic covid-19. Capaian kinerja tahun 2021 ini didukung dengan Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi, Kegiatan Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kotadengan output yang dihasilkan Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian kinerja tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020.

### 3.2.3. Aspek Daya Saing Daerah (Fokus Fasilitas Wilayah / Infrastruktur)

### 3.2.3.1. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

#### 3.2.3.1.1. Jenis dan Jumlah Bank dan Cabang

Indikator Kinerja jenis dan jumlah bank dan cabang pada tahun 2021 sebesar 10 atau mencapai 71.42 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021.

Capaian kinerja tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu 10 .

#### 3.2.3.1.2. Jenis dan Jumlah Perusahaan Asuransi dan Cabang

Indikator Kinerja jenis dan jumlah perusahaan asuransi dan cabang pada tahun 2021 sebesar 7 atau mencapai 50 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021.

Capaian kinerja tahun 2021 sama jika dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu 7 .

### 3.2.3. Aspek Daya Saing Daerah (Fokus Sumber Daya Manusia)

### 3.2.3.2. Urusan Ketenagakerjaan

#### 3.2.3.2.1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Indikator Kinerja rasio lulusan S1/S2/S3 pada tahun 2021 sebesar 291 (AK1 online) atau mencapai 47.94 % dari target RPJMD tahun 2021, capaian tersebut belum mencapai target RPJMD tahun 2021 dikarenakan pendaftar AK1 didominasi oleh lulusan SD, SLTP dan SLTA.

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 189 turun 102 menjadi 291.

#### 3.2.3.2.2. Rasio Ketergantungan

Indikator Kinerja rasio ketergantungan pada tahun 2021 sebesar 0,44 atau mencapai 89.79 % dari target RPJMD tahun 2021. Dicapai melalui jumlah

penduduk usia (0-14) + (65 keatas) dibagi jumlah jumlah penduduk usia produktif (15-64). Dimana jumlah penduduk usia 0-14 adalah 104.264, usia 65 keatas adalah 78.664 dan jumlah penduduk usia produktif (15-64) adalah 414.150 .

Capaian kinerja tahun 2021 mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2020 yaitu dari 0.54 naik 0.1 menjadi 0,44. Semakin tingginya % rasio ketergantungan menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif (15-64) untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif (0-14) dan tidak produktif lagi (>65).

Adapun permasalahan yang dihadapi sebagai berikut :

| No | Masalah | No | Solusi |
|---|---|---|---|
| **Urusan Tenaga Kerja** | | | |
| **1** | Ketersediaan data untuk menghitung data-data ketenagakerjaan yang sulit diakses terutama data jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin | **1** | Koordinasi dengan dinas terkait agar ketersediaan terpenuhi |
| **2** | Dengan adanya pandemi semua sistem menggunakan aplikasi online, seperti aplikasi pembuatan kartu kuning dan pelayanan perantaraan kerja banyak sekali masyarakat yg belum mengetahuinya | **2** | Sosialisasi penggunakan beberapa aplikasi ketenagakerjaan kepada masyarakat luas |
| **3** | Belum adanya koordinasi, pendampingan, pemberdayaan dan pembiayaan dengan BKK SMK yang merupakan rekan kerja dari bidang tenaga kerja dalam proses penempatan tenaga kerja terutama alumni-alumni dari SMK | **3** | Mengusulkan agar kegiatan tersebut bisa di hadirkan kembali dalam kegiatan di dinas dengan pembiayaan APBD yang ada |
| **4** | Keterbatasan SDM di bidang tenaga kerja baik di dalam atau di lapangan seperti memantau petugas rekruitmen tenaga kerja yang ditugasi oleh perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja khususnya di sektor AKAD karena selama ini banyak sekali petugas | **4** | Mengusulkan kepada dinas terkait (BKD) tentang penambahan personel PNS di bidang ketenagakerjaan dan mengirimkan surat edaran kepada perusahaan tentang petugas rekruitmen dan standar pemberangkatan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | rekruitmen yang ilegal dan pemberangkatnanya tidak menggunakan prosedur yang tepat | | tenaga kerja |
| **5** | Belum munculnya nomenklatur urusan tenaga kerja di nama dinas sehingga sering muncul hambatan jika akan berkoordinasi dengan pihak kementerian tenaga kerja | **5** | Mengajukan usulan perubahan nama dinas dan struktur organisasi sesuai Permendagri No. 90 Tahun 2019 |
| **Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah** | | | |
| **6** | Kerjasama antar perangkat organisasi koperasi (pengurus, pengawas dan anggota) kurang maksimal ; pengurus koperasi rangkap jabatan menimbulkan fokus perhatiannya terhadap pengelolaan koperasi berkurang ; kualitas SDM tentang perkoperaisan yang masih terbatas ; pembukuan dan administrasi koperasi tidak dijalankan dengan baik | **6** | Memberikan pembinaan, pendidikan dan pelatihan kepada pengurus, pengawas dan anggota koperasi ; membenahi kondisi internal koperasi |
| **7** | Masih rendahnya masyarakat untuk menjadi anggota koperasi dan kurangnya inovasi koperasi untuk menarik minat masyarakat untuk menjadi anggota koperasi | **7** | Memotivasi masyarakat untuk ikut andil dalam pengembangan koperasi ; adanya edukasi/sosialisasi kepada masyarakat mengenai jati diri koperasi yang sebenarnya |
| **8** | Bertambahnya persaingan dari badan usaha yang lain yang secara bebas memasuki bidang usaha yang sedang ditangani oleh koperasi : usaha yang dijalankan koperasi cenderung monoton dan tidak berada pada sektor-sektor strategis | **8** | Mendorong koperasi agar dapat mengembangkan usahanya dalam bidang-bidang yang lebih menjanjikan ; pemberian modal koperasi oleh pemerintah dan juga masyarakat yang memiliki dana dapat menyimpan uang mereka dikoperasi supaya memperluas usahanya. |
| **9** | Kurangnya sarana prasarana penunjang kegiatan berkoperasi ; kurangnya fasilitas yang dapat menarik perhatian masyarakat | **9** | Menyediakan sarana prasarana untuk menunjang kegiatan supaya lebih efektif |
| **10** | Bidang Usaha Mikro : keterbatasan pasar, kurangnya pemanfaatan IT, dan kurangnya modal usaha | **10** | menyelenggarakan keperantaraan pasar dan temu bisnis ; menyelenggarakan |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | bimtek marketing online untuk digitalisasi usaha ; memberikan fasilitasi permodalan |
| **11** | Pengelolaan Dana Bergulir : Pelaksanaan survei kelayakan usaha terhambat dan kondisi ekonomi UMKM / pelaku usaha menurun oleh adanya pandemi covid-19 ; | **11** | Pelaksanaan survei kelayakan usaha diprioritaskan pada daerah diluar zona merah dan dilaksanakan secara online serta penundaan angsuran pinjaman selama 4 bulan (April s/d Juli) |
| **Urusan Ketransmigrasian** | | | |
| **12** | Kuota calon transmigran sudah ditentukan oleh pemerintah pusat ; Penundaan pemberangkatan calon transmigran karena adanya pandemi covid-19 | **12** | Menunggu kebijakan pemerintah pusat tentang kuota dan pemberangkatan calon transmigran selama pandemi covid-19 |

## DOKUMENTASI

## Urusan : Tenaga Kerja

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | DOKUMENTASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | **Ds. Banjarjo, Kec. Kebonagung**<br> <br> |
| 2 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | **Ds. Belah, Kec. Donorojo** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | ➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | <br>**Ds. Belah, Kec. Donorojo**<br> |
| 3 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Bolosingo, Kec. Pacitan<br> <br> |
| 4 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang- | Ds. Dadapan, Kec. Pringkuku<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | undangan | Ds. Dadapan, Kec. Pringkuku<br> |
| 5 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Donorojo, Kec. Donorojo<br> <br> |
| 6 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds.Glinggangan, Kec. Pringkuku<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ds.Glinggangan, Kec. Pringkuku<br> |
| 7 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Karanganyar, Kec. Kebonagung<br> <br> |
| 8 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Karanggede, Kec. Arjosari<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ds. Karanggede, Kec. Arjosari<br> |
| 9 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Karangrejo, Kec. Arjosari<br> <br> |
| 10 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Ketro, Kec. Kebonagung<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ds. Ketro, Kec. Kebonagung<br> |
| 11 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Losari, Kec. Tulakan<br> <br> |
| 12 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Mendolo Kidul, Kec. Punung<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ds. Mendolo Kidul, Kec. Punung<br> |
| 13 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Ngadirejan, Kec. Pringkuku<br> <br>Ds. Ngadirejan, Kec. Pringkuku<br> |
| 14 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Pelem, Kec. Pringkuku<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ds. Pelem, Kec. Pringkuku<br> |
| 16 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Punung, Kec. Punung<br> <br> |
| 17 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Semanten, Kec. Pacitan<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Ds. Semanten, Kec. Pacitan<br> |
| 18 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan<br> <br>Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan<br> |
| 19 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | Ds. Tahunan Baru, Kec. Tegalombo<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| 20 | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | ➢ Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah<br><br>➢ Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan | PLUT KUMKM Kab. Pacitan<br> <br> |
| 21 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br><br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Donorojo, Kec. Donorojo<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Donorojo, Kec. Donorojo<br> |
| 22 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Belah, Kec. Donorojo<br> <br> |
| 23 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Mendolo Kidul, Kec. Punung<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Mendolo Kidul, Kec. Punung<br> |
| 24 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Ngadirejan, Kec. Pringkuku<br> <br> |
| 25 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Pelem, Kec. Pringkuku<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Pelem, Kec. Pringkuku<br> |
| 26 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Punjung, Kec. Kebonagung<br> <br> |
| 27 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan Ds. Wonogondo, Kec. Kebonagung<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pelatihan Kewirausahaan Rakit Baja Ringan<br>Ds. Wonogondo, Kec. Kebonagung<br> |
| 28 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka<br>Ds. Belah, Kec. Donorojo<br> <br>Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka<br>Ds. Belah, Kec. Donorojo<br> |
| 29 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka<br>Ds. Tahunan Baru, Kec. Tegalombo<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka Ds. Tahunan Baru, Kec. Tegalombo<br> |
| 30 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka Ds. Losari, Kec. Tulakan<br> <br> |
| 31 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka Ds. Wonogondo, Kec. Kebonagung<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka Ds. Wonogondo, Kec. Kebonagung<br> |
| 32 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka Ds. Donorojo, Kec. Donorojo<br> <br> |
| 33 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka Ds. Pelem, Kec. Pringkuku<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Biofarmaka Ds. Pelem, Kec. Pringkuku<br> |
| 34 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit Ds. Glinggangan, Kec. Pringkuku<br> <br> |
| 35 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit Ds. Karanganyar, Kec. Kebonagung<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit Ds. Karanganyar, Kec. Kebonagung<br> |
| 36 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit Ds. Punung, Kec. Punung<br> <br> |
| 37 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit Ds. Ketro, Kec. Kebonagung<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit<br>Ds. Ketro, Kec. Kebonagung<br> |
| 38 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br><br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit<br>Ds. Mendolo Kidul, Kec. Punung<br> <br>Pelatihan Kewirausahaan Menjahit<br>Ds. Mendolo Kidul, Kec. Punung<br> |
| 39 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br><br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit<br>Ds. Mentoro, Kec. Pacitan<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Menjahit Ds. Mentoro, Kec. Pacitan<br> |
| 40 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Ds. Punung, Kec. Punung<br> <br> |
| 41 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja | Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Ds. Tahunan Baru, Kec. Tegalombo<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Berdasarkan Klaster Kompetensi | |
| 42 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br><br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan<br> <br> |
| 43 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br><br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Ds. Glinggangan, Kec. Pringkuku<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Ds. Glinggangan, Kec. Pringkuku<br> |
| 44 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br><br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Ds. Mentoro, Kec. Pacitan<br> <br> |
| 45 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br><br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan | Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Ds. Losari, Kec. Tulakan<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Pakan Ternak Ds. Losari, Kec. Tulakan<br> |
| 46 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Prosesing Ds. Ngadirejan, Kec. Pringkuku<br> <br> |
| 47 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan | Pelatihan Kewirausahaan Prosesing Ds. Karanganyar, Kec. Kebonagung<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Prosesing Ds. Karanganyar, Kec. Kebonagung<br> |
| 48 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Prosesing Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan<br> <br>Pelatihan Kewirausahaan Prosesing Kel. Sidoharjo, Kec. Pacitan<br> |
| 49 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari | Pelatihan Kewirausahaan Prosesing Ds. Bolosingo, Kec. Pacitan<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Prosesing Ds. Bolosingo, Kec. Pacitan<br> |
| 50 | Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja | ➢ Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi<br>➢ Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi | Pelatihan Kewirausahaan Prosesing Ds. Ketro, Kec. Kebonagung<br> <br> |

**DOKUMENTASI**

**Urusan : Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah**

| NO | PROGRAM | KEGIATAN | DOKUMENTASI |
|---|---|---|---|
| 1 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Fasilitasi Dana Bergulir | Survey lokasi usaha Calon Penerima Dana Bergulir<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | <br>Rapat Kelompok Kerja Realisasi Dana Bergulir<br> <br> <br>Penyaluran Dana Bergulir ke Nasabah<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Perluasan Akses Permodalan | Sosialisasi Permodalan<br> |
| 3 | Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil, dan usaha mikro (umkm) | Kegiatan : Pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan<br><br>Sub kegiatan : Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro | Akses perijinan (NIB,PIRT)<br> <br>Usaha mikro yang mendapatkan pendampingan<br> <br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | Bantuan alat pengering biofarmaka<br> <br> |
| 4 | Program Pengembangan Kewirausahaan Dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Koperasi dan UMKM sebagai Penunjang PLUT | Ekspos PLUT<br> <br>Digital Marketing<br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | Program Penciptaan Iklim Usaha Mikro yang Kondusif | Fasilitasi Pengembangan Usaha Mikro | <br> |
| 1 | PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM | Kegiatan : Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/ Kota | <br> |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 2 | PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI | Kegiatan : Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/ Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Pacitan | <br> |
| | | | <br> |

## 1.3. REALISASI ANGGARAN

| No | | Uraian | Pagu (Rp) | Realisasi (Rp) | Capaian (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **BELANJA** | | | **8.188.084.553,00** | | |
| **BELANJA OPERASI** | | | **8.153.197.553,00** | | |
| **BELANJA MODAL** | | | **34.887.000,00** | | |
| **I** | | **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **1.000.000.000,00** | **955.558.750,00** | **95.56** |
| | 1 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1.000.000.000,00 | 955.558.750,00 | 95.56 |
| | | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 1.000.000.000,00 | 955.558.750,00 | 95.56 |
| **II** | | **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota** | **3.286.889.017,00** | **3.086.152.550,00** | **93.89** |
| | 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 22.767.050,00 | 22.388.475,00 | 98.34 |
| | | Penyusunan Dokumen Perncanaan Perangkat Daerah | 2.761.850,00 | 2.697.250,00 | 97.66 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 3.499.850,00 | 3.447.575,00 | 98.51 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 3.499.850,00 | 3.449.975,00 | 98.57 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 3.499.850,00 | 3.447.550,00 | 98.51 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD | 3.499.850,00 | 3.443.750,00 | 98.40 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 3.243.950,00 | 3.194.150,00 | 98.46 |
| | | Evaluasi Kinerja Prangkat Daerah | 2.761.850,00 | 2.708.225,00 | 98.06 |
| | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 2.889.417.717,00 | 2.705.230.288,00 | 93.63 |
| | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 2.879.811.717,00 | 2.695.716.788,00 | 93.61 |
| | | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi keuangan SKPD | 1.148.000,00 | 1.148.000,00 | 100 |
| | | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD | 6.860.000,00 | 6.767.500,00 | 98.65 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 450.000,00 | 450.000,00 | 100 |
| | | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD | 1.148000,00 | 1.148000,00 | 100 |
| | 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 38.520.620,00 | 38.357.880,00 | 99.58 |
| | | Penyediaan Komponen Instalasi Listri/Penerangan Bangunan Kantor | 2.770.500,00 | 2.764.850,00 | 99.80 |
| | | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 14.760.750,00 | 14.735.500 | 99.83 |
| | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 20.989.370,00 | 20.857.530,00 | 99.37 |
| | 4 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 34.887.000,00 | 34.815.000,00 | 99.79 |
| | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34.887.000,00 | 34.815.000,00 | 99.79 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 290.376.430,00 | 275.856.108,00 | 95.00 |
| | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 29.722.450,00 | 29.716.000,00 | 99.98 |
| | | Peneydiaaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 79.431.080,00 | 67.646.188,00 | 85.16 |
| | | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 20.422.900,00 | 17.693.920,00 | 86.64 |
| | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 160.800.000,00 | 160.800.000,00 | 100 |
| | 6 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pememrintah Daerah | 10.920.200,00 | 9.504.799,00 | 87.04 |
| | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 4.600.000,00 | 3.184.900,00 | 69.24 |
| | | Pememliharaan Perlaatan dan Mesin Lainnya | 6.320.200,00 | 6.319.899,00 | 100 |
| **III** | | **Program Pelatihan kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja** | **2.544.243.936,00** | **2.321.391.492,00** | **91.24** |
| | 1 | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi | 2.544.243.936,00 | 2.321.391.492,00 | 91.24 |
| | | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi | 2.544.243.936,00 | 2.321.391.492,00 | 91.24 |
| **IV** | | **Program Hubungan Industrial** | **14.245.800,00** | **13.915.800,00** | **97.68** |
| | 1 | Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.245.800,00 | 13.915.800,00 | 97.68 |
| | | Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Saran Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Serta Pengupahan | 14.245.800,00 | 13.915.800,00 | 97.68 |
| **V** | | **Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam** | **14.000.000,00** | **13.999.750,00** | **100** |
| | 1 | Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 14.000.000,00 | 13.999.750,00 | 100 |
| | | Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 14.000.000,00 | 13.999.750,00 | 100 |
| **VI** | | **Program Pengawasan dan Pemeriksaaan Koperasi** | **15.000.000,00** | **13.724.600** | **91.50** |
| | 1 | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 15.000.000,00 | 13.724.600 | 91.50 |
| | | Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Katangguhan, Serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota. | 15.000.000,00 | 13.724.600 | 91.50 |
| **VII** | | **Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian** | **528.058.000,00** | **527.557.850,00** | **99.91** |
| | 1 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam | 230.375.000,00 | 230.158.350,00 | 99.91 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Daerah Kabupaten/Kota | | | |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi | 230.375.000,00 | 230.158.350,00 | 99.91 |
| | 2 | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | 297.683.000,00 | 297.399.500,00 | 99.90 |
| | | Peningkatan Pemahaman dan Penetahuan UKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UKM | 297.683.000,00 | 297.399.500,00 | 99.90 |
| **VIII** | | **Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi** | **155.000.000,00** | **154.989.950,00** | **99.99** |
| | 1 | Pemebrdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 155.000.000,00 | 154.989.950,00 | 99.99 |
| | | Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tamabah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajement, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota | 155.000.000,00 | 154.989.950,00 | 99.99 |
| **IX** | | **Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)** | **615.990.000,00** | **615.647.800,00** | **99.94** |
| | 1 | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kmeitraan, Kemudahan, Perizinan,Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | 615.990.000,00 | 615.647.800,00 | 99.94 |
| | | Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro | 17.790.000,000 | 17.645.000,00 | 99.18 |
| | | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro | 598.200.000,00 | 598.002.800,00 | 99.97 |
| **X** | | **Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi** | **14.657.800,00** | **14.662.800,00** | **99.76** |
| | 1 | Penataan Persebaran Panduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.657.800,00 | 14.662.800,00 | 99.76 |
| | | Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 14.657.800,00 | 14.662.800,00 | 99.76 |

# BAB IV
# Penutup

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada stakeholders terkait atas capaian kinerja pemberdayaan koperasi dan usaha mikro yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan pada Tahun 2021. Selain hal tersebut LKj.IP Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya Good Government.

Disadari bahwa hasil pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran strategis tahun 2021 belum dapat maksimal dalam pencapaiannya. Hal tersebut dapat dilihat dari capaian sasaran strategis yang belum dapat memenuhi seratus persen.

Berdasarkan hasil evaluasi 2021, maka untuk kedepannya, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan akan terus melakukan optimalisasi dalam meningkatkan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Selain itu , Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan akan terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi, baik internal maupun eksternal dengan instansi terkait lainnya dalam rangka mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan serta monitoring evaluasi terhadap apa yang telah dilaksanakan, terutama selama tahun 2016-2021.

Berdasarkan respond dan peran dari masyarakat, program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan sangat dibutuhkan untuk dapat menurunkan pengangguran.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj.IP) Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2021 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban kepada publik. Selanjutnya, diharapkan laporan ini dapat menjadi referensi dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan serta mengoptimalkan pencapaian Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan di masa yang akan datang.

Pacitan, Desember 2021

Kepala Dinas
Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Pacitan

Dra. ENY SETYOWATI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 196404011990032008